

Pendidikan Islam Dalam Sekolah Rakyat (SR): Institusi Pendidikan Yang Dikelola Pemerintah Pada Masa Kolonial

Oleh:

Khoirul Anam, Maimun, Abdul Holik

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Madura, Indonesia

Email: khoirulqudsi12@gmail.com

Abstract

This study examines the role and contribution of Sekolah Rakyat (SR) as a government-managed educational institution during the colonial period in Indonesia, with a particular focus on Islamic education. Sekolah Rakyat was established in response to the need for inclusive and accessible education, especially for marginalized groups. Through historical analysis, this article reveals how Islamic education was integrated into the SR curriculum, aiming not only to provide religious knowledge but also to foster students' character and morality. Additionally, this research explores the challenges and dynamics faced by SR within the context of colonial policies and its impact on the development of Islamic education in society. Thus, this article provides an in-depth insight into the significance of Islamic education within formal education during the colonial era and its implications for education in Indonesia today.

Keywords: *Sekolah Rakyat (SR), Islamic Education, Colonial Period*

A. Pendahuluan

Dengan munculnya kesadaran di kalangan pemerintah kolonial bahwa mereka memerlukan tenaga kerja terdidik dari kalangan pribumi, khususnya dalam administrasi kolonial dan sektor ekonomi, mereka mulai mendirikan sekolah-sekolah untuk rakyat pribumi. Hal ini bertepatan dengan kebijakan Politik Etis yang dicanangkan oleh pemerintah Belanda pada awal abad ke-20, yang bertujuan untuk memberikan “balas budi” kepada rakyat pribumi yang telah lama dieksploitasi.¹

Sekolah Rakyat (SR) merupakan salah satu bentuk institusi pendidikan dasar yang didirikan oleh pemerintah kolonial Belanda di Indonesia pada awal abad ke-20. Sebelum berdirinya SR, pendidikan formal di Hindia Belanda (nama Indonesia saat itu) sangat terbatas dan sebagian besar hanya tersedia bagi anak-anak dari kalangan elit Eropa dan pribumi yang dekat dengan pemerintahan kolonial. Pendidikan ini diselenggarakan melalui *Europeesche Lagere School* (ELS) yang berfokus pada anak-anak Eropa dan pribumi elit yang telah berbaaur dengan budaya Barat.²

¹ Muhammad Sabarudin, “Pola dan Kebijakan Pendidikan Islam Masa Awal dan Sebelum Kemerdekaan” 1, no. 1 (2015): 167.

² Miftahur Rohman, “KEBIJAKAN PENDIDIKAN ISLAM MASA PENJAJAHAN JEPANG” (OSF, September 29, 2018), 26, <https://doi.org/10.31219/osf.io/ack3p>.

Pendidikan di Indonesia selama masa kolonial Belanda mengalami berbagai dinamika yang mencerminkan pertemuan antara sistem pendidikan Barat dan tradisi pendidikan lokal. Salah satu institusi pendidikan yang muncul pada masa ini adalah Sekolah Rakyat (SR), yang didirikan oleh pemerintah kolonial dengan tujuan untuk memberikan pendidikan dasar kepada masyarakat pribumi. Meskipun SR pada dasarnya berfungsi sebagai alat untuk menyebarkan nilai-nilai kolonial dan menjaga stabilitas pemerintahan kolonial, unsur pendidikan agama, khususnya Islam, tetap diupayakan untuk diintegrasikan dalam kurikulumnya.³

Pendidikan Islam memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Meskipun pemerintah kolonial berusaha mengendalikan pendidikan dan mengarahkan kurikulum SR agar lebih sekuler dan pro-kolonial, pendidikan Islam tidak dapat diabaikan sepenuhnya karena posisinya yang sangat vital dalam kehidupan spiritual dan sosial masyarakat. Oleh karena itu, pendidikan Islam dalam SR menjadi sebuah arena kompromi dan negosiasi antara kepentingan kolonial dan kebutuhan spiritual masyarakat Muslim.⁴

Kajian ini akan mengkaji bagaimana pendidikan Islam diintegrasikan ke dalam kurikulum SR, peran guru agama dalam institusi tersebut, serta respons masyarakat Muslim terhadap bentuk pendidikan yang diberikan. Dengan demikian, diharapkan artikel ini dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai posisi dan peran pendidikan Islam di tengah sistem pendidikan kolonial yang dikelola oleh pemerintah Belanda.

B. Pembahasan

1. Sejarah Sekolah Rakyat (SR)

Sekolah Rakyat (SR) lahir dari rahim kebijakan Politik Etis yang dicanangkan oleh pemerintah Belanda pada awal abad ke-20.⁵ Kebijakan ini, yang sering disebut sebagai "politik balas budi", merupakan respons terhadap kritik yang semakin keras terhadap eksploitasi kolonial di Hindia Belanda. Salah satu pilar utama Politik Etis adalah edukasi, yang dianggap sebagai kunci untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk pribumi sekaligus mempersiapkan mereka untuk peran yang lebih besar dalam administrasi kolonial. Sebelum hadirnya SR, lanskap pendidikan di Hindia Belanda didominasi oleh

³ Moch Khafidz Fuad Raya, "Sejarah Orientasi Pendidikan Islam Di Indonesia (Dari Masa Kolonial Hingga Orde Baru)," *Jurnal Pendidikan Islam* 8, no. 2 (2018): 229.

⁴ Fedry Saputra, "SEJARAH PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN PENDIDIKAN ISLAM DI INDONESIA," *AL-HIKMAH (Jurnal Pendidikan Dan Pendidikan Agama Islam)* 3, no. 1 (January 22, 2021): 101, <https://doi.org/10.36378/al-hikmah.v3i1.1137>.

⁵ Andi Suherman and Weny Widyawati Bastaman, "PERKEMBANGAN SEKOLAH RAKYAT (VOLKSCHOOL) DI GUNUNG KENCANA KABUPATEN LEBAK BANTEN TAHUN 1940 - 1964," *BIHARI: JURNAL PENDIDIKAN SEJARAH DAN ILMU SEJARAH* 2, no. 2 (December 31, 2019): 1, <https://jurnal.unsil.ac.id/index.php/bihari/article/view/1277>.

Europeesche Lagere School (ELS) dan Hollandsch-Inlandsche School (HIS). ELS diperuntukkan bagi anak-anak Eropa dan segelintir pribumi dari kalangan elit, sementara HIS, meskipun lebih inklusif, tetap terbatas pada anak-anak pribumi dari kelas sosial atas atau mereka yang memiliki kedekatan dengan pemerintah kolonial. Kedua institusi ini menggunakan bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar dan menerapkan kurikulum yang sangat berorientasi pada budaya Eropa.⁶

SR hadir sebagai alternatif yang lebih terjangkau dan inklusif. Berbeda dengan ELS dan HIS, SR menggunakan bahasa Melayu (yang kemudian berkembang menjadi bahasa Indonesia) sebagai bahasa pengantar. Ini merupakan langkah signifikan dalam demokratisasi pendidikan, memungkinkan akses yang lebih luas bagi anak-anak pribumi dari berbagai latar belakang sosial dan ekonomi.

Namun, kehadiran SR bukan tanpa kontroversi. Bagi sebagian kalangan, terutama elit pribumi yang telah mengadopsi gaya hidup Barat, SR dianggap sebagai pendidikan kelas dua. Mereka lebih memilih mengirim anak-anak mereka ke HIS atau bahkan ELS, yang dianggap membuka pintu menuju posisi yang lebih baik dalam hierarki kolonial. Di sisi lain, bagi mayoritas penduduk pribumi yang sebelumnya tidak memiliki akses ke pendidikan formal, SR menjadi kesempatan berharga untuk meningkatkan kualitas hidup melalui pendidikan.⁷

Struktur kurikulum SR mencerminkan tujuan ganda pemerintah kolonial: memberikan keterampilan dasar yang diperlukan untuk tenaga kerja yang lebih produktif, sekaligus menanamkan nilai-nilai yang mendukung keberlangsungan sistem kolonial. Mata pelajaran utama meliputi membaca, menulis, dan berhitung, ditambah dengan pengetahuan dasar tentang sejarah, geografi, dan ilmu alam. Namun, interpretasi sejarah dan geografi sering kali bias, menekankan keunggulan peradaban Barat dan "jasa" kolonialisme bagi Hindia Belanda.⁸ Durasi pendidikan di SR awalnya bervariasi antara 3 hingga 5 tahun, tergantung pada kebutuhan dan sumber daya di masing-masing daerah. Namun, seiring waktu, standarisasi mulai diterapkan dan durasi 5-6 tahun menjadi norma. Meskipun demikian, kualitas pendidikan di SR seringkali jauh dari ideal. Kekurangan guru terlatih, fasilitas yang minim, dan overkapasitas kelas menjadi masalah umum yang dihadapi.

⁶ Veronika Horohiung, "Pendidikan Formal Era Hindia Belanda di Kepulauan Sangihe Pada tahun 1848 â€“ 1945," *Jurnal Pendidikan Sejarah* 5, no. 2 (July 30, 2016): 10, <https://doi.org/10.21009/JPS.052.05>.

⁷ Horohiung, 10.

⁸ Rohman, "KEBIJAKAN PENDIDIKAN ISLAM MASA PENJAJAHAN JEPANG," 3.

Terlepas dari berbagai keterbatasan, kehadiran SR membawa dampak signifikan bagi masyarakat pribumi. Pertama, SR memperluas akses pendidikan formal, menciptakan generasi baru pribumi terdidik yang nantinya akan memainkan peran penting dalam pergerakan nasional Indonesia. Kedua, penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar tidak hanya memfasilitasi proses pembelajaran, tetapi juga berkontribusi pada penyebaran dan pengembangan bahasa ini sebagai *lingua franca* di seluruh Nusantara. Namun, di balik manfaat-manfaat tersebut, SR juga menjadi arena kontestasi kultural dan ideologis. Bagi pemerintah kolonial, SR adalah alat untuk menciptakan kelas pekerja terdidik yang patuh dan mendukung sistem kolonial. Bagi kalangan nasionalis dan agamis, SR dilihat sebagai ancaman potensial terhadap nilai-nilai tradisional dan identitas kultural pribumi. Ketegangan ini paling jelas terlihat dalam perdebatan seputar posisi pendidikan agama, khususnya Islam, dalam kurikulum SR.

Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, SR mengalami transformasi menjadi Sekolah Dasar (SD) pada 13 Maret 1946. Meskipun nama dan struktur berubah, warisan SR tetap terasa dalam sistem pendidikan nasional Indonesia. Pengalaman SR menjadi pelajaran berharga tentang pentingnya pendidikan yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan lokal, sekaligus mengingatkan akan bahaya instrumentalisasi pendidikan untuk kepentingan politik sempit. Transisi dari SR ke SD bukan sekadar perubahan nama, melainkan mencerminkan pergeseran paradigma pendidikan di Indonesia yang baru merdeka. Jika SR dirancang terutama untuk memenuhi kebutuhan sistem kolonial, SD dimaksudkan untuk membangun fondasi bagi negara bangsa yang berdaulat. Kurikulum direvisi untuk menekankan nilai-nilai nasionalisme dan pembangunan karakter, sementara bahasa Indonesia dikukuhkan sebagai bahasa pengantar utama di seluruh negeri.

Namun, tantangan yang dihadapi oleh sistem pendidikan pasca-kemerdekaan tidak kalah berat. Kekurangan guru, infrastruktur yang rusak akibat perang, dan kebutuhan untuk menyatukan berbagai sistem pendidikan warisan kolonial menjadi hambatan serius. Di tengah keterbatasan ini, pengalaman SR dalam menjangkau masyarakat luas dengan sumber daya terbatas menjadi modal berharga. Lebih jauh lagi, perdebatan tentang posisi pendidikan agama yang telah dimulai pada era SR terus berlanjut dalam konteks Indonesia merdeka. Pancasila sebagai dasar negara menegaskan pentingnya kehidupan beragama, namun implementasinya dalam sistem pendidikan nasional membutuhkan negosiasi dan kompromi yang rumit. Pengalaman SR dalam menghadapi dilema ini menjadi pelajaran berharga bagi para perumus kebijakan pendidikan di era kemerdekaan.

Dengan demikian, sejarah SR bukan hanya catatan tentang kebijakan pendidikan kolonial, tetapi juga cermin yang merefleksikan dinamika sosial, kultural, dan politik yang lebih luas di Indonesia. Memahami sejarah ini penting tidak hanya untuk mengapresiasi perjuangan pendidikan di masa lalu, tetapi juga untuk memetakan tantangan dan peluang dalam pengembangan sistem pendidikan yang lebih adil dan berkualitas di masa depan.

2. Pendirian Dan Struktur Kurikulum

Sekolah Rakyat (SR) didirikan sebagai sekolah dasar yang diperuntukkan bagi anak-anak pribumi dengan durasi pendidikan selama 5-6 tahun. SR memberikan pelajaran dasar yang meliputi membaca, menulis, dan berhitung, serta pengetahuan dasar lainnya seperti sejarah, geografi, dan ilmu alam. Bahasa pengantar yang digunakan di SR adalah bahasa Melayu, yang saat itu menjadi bahasa pengantar di berbagai wilayah Nusantara.⁹

Pada awalnya, pendidikan di SR sangat terbatas dan bertujuan untuk memberikan keterampilan dasar yang dibutuhkan oleh penduduk pribumi untuk berfungsi dalam masyarakat kolonial. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, ada upaya dari kalangan pribumi dan reformis pendidikan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di SR, termasuk mengintegrasikan pendidikan agama dan nilai-nilai moral dalam kurikulum.¹⁰

Meskipun tujuan utama SR adalah untuk memberikan pendidikan sekuler yang mendukung kepentingan kolonial, pemerintah kolonial menyadari pentingnya memasukkan elemen pendidikan agama Islam dalam kurikulum. Hal ini dilakukan untuk mengakomodasi mayoritas penduduk pribumi yang beragama Islam dan mengurangi potensi perlawanan dari masyarakat yang menginginkan pendidikan agama.¹¹ Pendidikan agama Islam di SR biasanya diberikan oleh guru-guru agama yang diangkat oleh pemerintah, meskipun materi yang diajarkan sering kali terbatas dan disesuaikan dengan kebijakan kolonial.¹² Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, Sekolah Rakyat (SR) mengalami transformasi dari 1941 menjadi Sekolah Dasar (SD) pada 13 Maret 1946.¹³

⁹ "View of INOVASI PENDIDIKAN (SUATU STUDI KEBIJAKSANAAN PENDIDIKAN ORDE LAMA)," 26, accessed September 24, 2024, <http://ejournal.stit-ru.ac.id/index.php/raudhah/article/view/74/80>.

¹⁰ Sabarudin, "Pola dan Kebijakan Pendidikan Islam Masa Awal dan Sebelum Kemerdekaan," 166.

¹¹ Dwi Lestari, "RESPON SAREKAT ISLAM TERHADAP KEBIJAKAN PENDIDIKAN PEMERINTAH KOLONIAL BELANDA (1905-1933)," *JSI: Jurnal Sejarah Islam* 1, no. 01 (July 25, 2022): 17, <https://doi.org/10.24090/jsij.v1i1.6644>.

¹² Tasman Hamami, "PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI SEKOLAH UMUM SEBAGAI KEHARUSAN SEJARAH," n.d., 176.

¹³ admin, "Sejarah Sekolah Rakyat Di Indonesia," *Museum Pendidikan Nasional* (blog), October 10, 2023, <https://museumpendidikannasional.upi.edu/sejarah-sekolah-rakyat-di-indonesia/>.

Sekolah Dasar ini kemudian menjadi bagian integral dari sistem pendidikan nasional Indonesia yang baru terbentuk. Meskipun nama dan struktur sekolah telah berubah, warisan SR dalam pembentukan pendidikan dasar di Indonesia tetap signifikan. Sekolah Rakyat menjadi fondasi bagi perkembangan pendidikan di Indonesia, memberikan pendidikan dasar bagi jutaan anak-anak Indonesia dan membantu membangun basis intelektual yang kemudian berkontribusi pada upaya bangsa untuk mencapai kemerdekaan dan pembangunan nasional.¹⁴

3. Pengajaran Agama Islam Dalam Sekolah Rakyat (Sr) Pada Masa Kolonial

Pada masa kolonial, pengajaran agama Islam di Sekolah Rakyat (SR) merupakan isu yang sangat sensitif dan sarat dengan pertimbangan politik. Pemerintah kolonial Belanda, yang mengendalikan sistem pendidikan di Hindia Belanda, menggunakan pendidikan sebagai alat kontrol sosial untuk mengawasi dan mengarahkan masyarakat pribumi sesuai dengan kepentingan mereka. Pendidikan agama, khususnya Islam, tidak menjadi fokus utama dalam kurikulum yang dirancang oleh pemerintah kolonial. SR pada dasarnya didirikan untuk memberikan keterampilan dasar seperti membaca, menulis, dan berhitung, yang dianggap penting untuk menciptakan tenaga kerja yang dapat memenuhi kebutuhan ekonomi dan administratif kolonial.¹⁵

Meskipun ada permintaan dari masyarakat Muslim agar agama diajarkan di sekolah-sekolah, pemerintah kolonial cenderung membatasi ruang lingkup pengajaran agama dalam SR. Kurikulum formal yang diterapkan di SR hampir sepenuhnya didominasi oleh materi sekuler, dengan sedikit sekali ruang yang disediakan untuk pendidikan agama. Jika pengajaran agama Islam diizinkan, biasanya dilakukan di luar jam pelajaran reguler dan hanya mencakup aspek-aspek dasar dari agama, seperti pengenalan huruf Arab, bacaan shalat, dan dasar-dasar keimanan (aqidah).¹⁶

Pengajaran agama Islam di SR sering kali dilaksanakan oleh guru yang bukan bagian dari staf tetap sekolah, melainkan oleh guru agama yang diundang secara khusus. Guru-guru ini biasanya berasal dari lingkungan sekitar dan memiliki latar belakang pendidikan agama yang diperoleh dari madrasah atau pesantren. Metode pengajaran yang digunakan cenderung sederhana dan tradisional, dengan penekanan pada hafalan dan

¹⁴ Danna Aditya Rahma Fuadi and Devgano Risydan Al Anshori, "Perkembangan Pendidikan Indonesia pada Zaman Penjajahan Ii (Abad 20 Termasuk Masa Pendudukan Jepang)," *Global Education Journal* 1, no. 3 (July 26, 2023): 13, <https://doi.org/10.59525/gej.v1i3.217>.

¹⁵ Sabarudin, "Pola dan Kebijakan Pendidikan Islam Masa Awal dan Sebelum Kemerdekaan," 166.

¹⁶ Ibid.

pengulangan (rote learning), dibandingkan dengan pemahaman mendalam terhadap teks-teks keagamaan.¹⁷

Kebijakan kolonial terhadap pendidikan agama secara umum sangat ketat, karena pemerintah khawatir bahwa pendidikan agama yang terlalu luas atau mendalam bisa memicu semangat nasionalisme dan perlawanan terhadap kekuasaan kolonial. Meskipun pengajaran agama Islam diizinkan, itu dilakukan dalam bentuk yang sangat terbatas, dengan tujuan untuk mencegah perkembangan pemikiran kritis atau politik yang berorientasi pada kemerdekaan.^{18 19}

KOMPONEN	PENJELASAN
Materi Pelajaran	Doa-doa harian, surat pendek Al-Qur'an, dasar-dasar akhlak, sejarah singkat Nabi Muhammad.
Jumlah Jam Belajar	1-2 kali per minggu (30 menit - 1 jam per sesi)
Metode pengajaran	Ceramah, hafalan, dan bimbingan langsung
Sumber Ajar	Kitab pegangan yang sederhana dan disesuaikan oleh pemerintah kolonial, seperti buku doa dan kitab tafsir yang tidak kontroversial
Guru Pengajar	Guru agama yang mendapatkan izin dari pemerintah kolonial, sering kali guru ini juga berperan di madrasah atau pesantren lokal
Pengawasan	Materi dan pelaksanaan pelajaran diawasi oleh otoritas kolonial
Peran Madrasah/Surau	Sebagai pelengkap dan penambah pemahaman mendalam terhadap materi agama yang tidak diajarkan di SR

Pembatasan dalam pengajaran agama Islam di SR mencerminkan kebijakan pemerintah kolonial yang pada dasarnya tidak mendukung pengembangan pendidikan Islam formal di sekolah-sekolah negeri.²⁰ Hal ini menyebabkan ketidakpuasan di kalangan masyarakat Muslim, yang banyak dari mereka kemudian memilih untuk

¹⁷ Hamami, "PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI SEKOLAH UMUM SEBAGAI KEHARUSAN SEJARAH," 176.

¹⁸ Karsiwan Karsiwan and Lisa Sari, "Kebijakan Pendidikan Pemerintah Kolonial Belanda Pada Masa Politik Etis Di Lampung," *Tsaqofah Dan Tarikh Jurnal Kebudayaan Dan Sejarah Islam* VI (June 1, 2021): 266.

¹⁹ Sabarudin, "Pola dan Kebijakan Pendidikan Islam Masa Awal dan Sebelum Kemerdekaan," 166.

²⁰ Abdul Wahid et al., "Eksistensi Dan Kebijakan Pendidikan Islam Pada Masa Kolonial Belanda," October 1, 2022, 3.

mengirim anak-anak mereka ke madrasah atau pesantren, di mana pendidikan agama mendapat porsi yang lebih besar. Bagi mereka yang tidak memiliki akses ke lembaga pendidikan agama ini, pengajaran agama di SR menjadi satu-satunya sumber pendidikan agama formal, meskipun terbatas.²¹

No	Mata Pelajaran	Penjelasan	Metode
1	Doa-Doa Harian	Mencakup doa sebelum dan sesudah makan, doa keluar dan masuk rumah, doa belajar, dan doa tidur. Siswa diajarkan untuk memahami dan menghafalkan doa-doa ini sebagai bagian dari kebiasaan sehari-hari.	Hafalan dan pengulangan doa secara bersama-sama.
2	Surat Pendek Al-Qur'an	Pengajaran surat-surat pendek dari juz amma (juz ke-30 al-qur'an), seperti surat al-fatihah, al-ikhlas, an-nas, dan al-falaq. Fokus utama adalah hafalan dan pengucapan yang benar tanpa memahami maknanya secara mendalam.	Membaca bersama, hafalan, dan perbaikan tajwid (cara membaca).
3	Dasar-Dasar Akhlak	Pelajaran tentang nilai-nilai akhlak dan adab, seperti menghormati orang tua, bersikap jujur, bertanggung jawab, dan disiplin. Siswa diajarkan tentang pentingnya perilaku baik dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan ajaran Islam.	Ceramah, cerita-cerita teladan, dan diskusi sederhana.
4	Sejarah Singkat Nabi Muhammad	Pengajaran tentang kisah hidup Nabi Muhammad SAW, seperti kelahirannya, masa kecil, kenabian, dan perjuangan dalam menyebarkan Islam. Fokus pada peristiwa penting tanpa mendalami aspek teologis.	Ceramah dan bercerita tentang peristiwa kehidupan Nabi.
5	Rukun Iman	Pengenalan enam rukun iman: iman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari kiamat, dan qadha serta qadar. Pelajaran ini disampaikan secara sederhana dan menekankan keyakinan dasar Islam.	Penjelasan singkat dan hafalan konsep.
6	Rukun Islam	Pelajaran tentang lima rukun Islam: syahadat, shalat, zakat, puasa, dan haji. Siswa diajarkan pengertian dasar dan tata cara pelaksanaan, terutama yang dapat dipraktikkan sehari-hari seperti shalat dan puasa.	Ceramah, demonstrasi, dan latihan praktik sederhana.
7	Praktik Ibadah	Pengajaran tata cara wudhu dan shalat, mulai dari niat hingga gerakan shalat lengkap. Meskipun pembelajaran lebih banyak dalam	

²¹ Fuadi and Al Anshori, "Perkembangan Pendidikan Indonesia pada Zaman Penjajahan Ii (Abad 20 Termasuk Masa Pendudukan Jepang)," 5.

		bentuk teori, siswa juga diajak mempraktikkannya secara sederhana.	Demonstrasi langsung, bimbingan praktik, dan koreksi gerakan.
8	Hafalan Asmaul Husna	Pengajaran 99 nama Allah (Asmaul Husna) sebagai bentuk pengenalan sifat-sifat Allah. Siswa diajarkan untuk menghafalkan beberapa nama dan artinya.	Hafalan dan pengulangan secara bersama-sama.
9	Adab dan Etika Islami	Pengajaran tentang adab-adab dalam kehidupan sehari-hari, seperti adab makan dan minum, adab berpakaian, adab bertamu, dan adab berbicara. Siswa diajarkan bagaimana menerapkan adab-adab tersebut dalam interaksi harian.	Diskusi, simulasi, dan contoh perilaku.
10	Pengajaran Huruf Arab (Hijaiyah)	Pengajaran dasar-dasar huruf Hijaiyah untuk membantu siswa mengenal dan membaca Al-Qur'an. Penekanan pada pengenalan bentuk huruf dan cara membacanya.	Penulisan di papan tulis, latihan membaca, dan pengulangan.

Dari penjelasan di atas, sangat jelas bahwa pembelajaran agama Islam di SR (Sekolah Rakyat, yang sekarang setara dengan Sekolah Dasar) sangatlah dasar dan terbatas. Pembelajaran ini mencakup berbagai aspek penting dalam ajaran Islam, mulai dari praktik ibadah sehari-hari hingga pengenalan konsep-konsep iman yang fundamental. Metode pengajaran yang digunakan pun disesuaikan dengan tingkat pemahaman anak-anak usia sekolah dasar, mengutamakan pendekatan praktis, hafalan, dan pengenalan konsep-konsep dasar tanpa terlalu banyak pendalaman teologis.

Sebagai respons terhadap keterbatasan ini, beberapa komunitas Muslim berusaha untuk mengatasi situasi dengan cara-cara yang kreatif, seperti mendirikan kelas-kelas tambahan atau mengadakan kegiatan keagamaan di luar jam sekolah yang menawarkan pendidikan agama yang lebih mendalam. Selain itu, munculnya organisasi-organisasi keagamaan seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama juga menawarkan alternatif pendidikan yang lebih fokus pada agama Islam, baik melalui sekolah-sekolah swasta maupun melalui kegiatan dakwah.²²

Pengajaran agama Islam yang terbatas di SR pada akhirnya berkontribusi pada perkembangan sistem pendidikan ganda di Indonesia, di mana terdapat sekolah umum yang didominasi oleh kurikulum sekuler dan madrasah atau pesantren yang fokus pada pendidikan agama.²³ Pengalaman ini juga memperkuat kesadaran di kalangan masyarakat Muslim tentang pentingnya memiliki kendali yang lebih besar terhadap pendidikan anak-anak mereka, yang kemudian berperan dalam perjuangan untuk mengintegrasikan

²² Fuadi and Al Anshori, 5.

²³ Bahaking Rama, "SEJARAH PERKEMBANGAN PENDIDIKAN ISLAM DI INDONESIA," n.d., 84.

pendidikan Islam yang lebih signifikan dalam sistem pendidikan nasional setelah Indonesia merdeka.²⁴

4. Respon Masyarakat Terhadap Pendidikan Islam Di Sekolah Rakyat

Respons masyarakat terhadap pendidikan Islam dalam Sekolah Rakyat (SR) pada masa kolonial Belanda merefleksikan kompleksitas antara upaya mempertahankan identitas keagamaan dan menghadapi tekanan dari kekuasaan kolonial. Pada masa itu, Sekolah Rakyat dikelola oleh pemerintah kolonial dengan tujuan mengintegrasikan sistem pendidikan yang seringkali lebih menekankan aspek-aspek pendidikan Barat. Kehadiran SR menjadi alat kontrol sosial yang efektif bagi pemerintah kolonial untuk menyebarkan nilai-nilai dan budaya yang sejalan dengan kepentingan mereka, sering kali mengesampingkan kebutuhan dan aspirasi keagamaan masyarakat pribumi, khususnya umat Islam.²⁵

Di daerah-daerah dengan mayoritas penduduk Muslim, pendidikan Islam dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari dan identitas masyarakat. Kehadiran pelajaran agama Islam di SR menjadi harapan besar bagi mereka untuk menjaga nilai-nilai dan tradisi keagamaan di tengah upaya kolonial yang mencoba mengikisnya. Masyarakat Muslim melihat pendidikan Islam sebagai benteng terakhir untuk mempertahankan identitas keislaman anak-anak mereka dari pengaruh pendidikan kolonial yang cenderung sekuler dan tidak mengakomodasi ajaran agama. Oleh karena itu, penerapan pendidikan Islam dalam SR dipandang sebagai bentuk perlawanan halus (*soft resistance*) terhadap dominasi kolonial, memperlihatkan tekad masyarakat dalam mempertahankan integritas keagamaan di tengah himpitan budaya asing.²⁶

Meski demikian, respons terhadap pendidikan Islam di SR tidak bersifat monolitik. Di daerah-daerah dengan populasi yang lebih beragam, seperti wilayah perkotaan yang dihuni berbagai kelompok etnis dan agama, tanggapan terhadap keberadaan pendidikan Islam di SR menunjukkan beragam corak. Ada yang menyambut baik keberadaan pelajaran agama dalam kurikulum SR sebagai langkah menuju pengakuan akan hak-hak pendidikan yang sesuai dengan keyakinan mereka. Namun, ada pula kekhawatiran bahwa penekanan yang terlalu besar pada pendidikan agama bisa mengganggu keseimbangan

²⁴ Ibid 84

²⁵ Administrator, "Menyingkap Perkembangan Pendidikan Sejak Masa Kolonial Hingga Sekarang: Perspektif Pendidikan Kritis – Program Studi Pendidikan Sejarah," September 5, 2017, <https://sejarah.upi.edu/artikel/dosen/menyingkap-perkembangan-pendidikan-sejak-masa-kolonial-hingga-sekarang-perspektif-pendidikan-kritis/>.

²⁶ Ibid

pendidikan umum, dan berpotensi menciptakan kesenjangan atau fragmentasi sosial di tengah masyarakat yang beragam.

Salah satu aspek penting yang mempengaruhi respons masyarakat adalah kualitas pengajaran pendidikan Islam di SR. Banyak masyarakat yang menaruh harapan agar pendidikan agama tidak hanya disampaikan secara dogmatis, tetapi mampu menghidupkan nilai-nilai Islam dalam konteks kehidupan nyata. Mereka menginginkan metode pengajaran yang komunikatif, relevan, dan mampu menanamkan nilai-nilai keislaman secara mendalam namun tetap adaptif terhadap perkembangan zaman. Ketika guru agama dapat menghubungkan ajaran Islam dengan tantangan kehidupan sehari-hari, seperti etos kerja, kejujuran, toleransi, dan tanggung jawab, maka dukungan masyarakat terhadap pendidikan Islam di SR cenderung meningkat. Namun, jika pengajaran tersebut dilakukan dengan pendekatan yang terlalu kaku, normatif, dan tidak adaptif terhadap perubahan zaman, masyarakat, terutama yang progresif dan terbuka, sering kali menunjukkan respons yang lebih kritis dan skeptis.

Tokoh agama dan pemuka masyarakat memiliki peran strategis dalam menentukan arah dan penerimaan pendidikan Islam di Sekolah Rakyat. Mereka sering kali menjadi penengah dan penghubung antara masyarakat dan institusi pendidikan, berfungsi sebagai fasilitator yang mampu menjelaskan pentingnya pendidikan agama dalam membentuk karakter, moralitas, dan kepribadian anak-anak. Selain itu, para tokoh agama juga mengingatkan tentang pentingnya keseimbangan antara pendidikan agama dan pendidikan umum, agar generasi muda tidak hanya terampil dalam bidang keagamaan tetapi juga memiliki kemampuan berpikir kritis, inovatif, dan mampu bersaing di dunia yang semakin kompleks. Kehadiran tokoh-tokoh ini memastikan bahwa pendidikan agama tidak terasing dari konteks sosial dan ekonomi masyarakat, melainkan menjadi bagian integral dari upaya menciptakan generasi yang tangguh dan berdaya saing.

Namun, di sisi lain, kebijakan pemerintah kolonial Belanda yang membatasi dan mengatur ruang lingkup pendidikan agama menjadi tantangan tersendiri. Mereka cenderung memandang pendidikan Islam sebagai sesuatu yang harus dikendalikan agar tidak berkembang secara independen. Kebijakan ini menimbulkan frustrasi di kalangan masyarakat Muslim yang merasa bahwa pendidikan agama mereka tidak diberikan ruang yang memadai untuk tumbuh dan berkembang. Merespons situasi ini, banyak tokoh pendidikan dan ulama yang kemudian mengambil inisiatif mendirikan madrasah atau

sekolah-sekolah Islam sebagai alternatif pendidikan, dengan harapan dapat memberikan pendidikan agama yang lebih mendalam dan sesuai dengan kebutuhan umat Islam.

Secara keseluruhan, respons masyarakat terhadap pendidikan Islam dalam Sekolah Rakyat pada masa kolonial Belanda mencerminkan perjalanan panjang mereka dalam memperjuangkan identitas keagamaan dan budaya. Pendidikan Islam di SR bukan hanya sekadar bagian dari proses belajar-mengajar, tetapi juga menjadi arena perjuangan kultural, spiritual, dan politik. Melalui pendidikan ini, masyarakat Muslim berusaha menanamkan nilai-nilai Islam pada generasi muda agar tetap teguh dalam keimanan dan tidak tercerabut dari akar budayanya, meskipun hidup dalam bayang-bayang penjajahan. Mereka berharap, melalui pendidikan Islam, lahir generasi yang tidak hanya terampil dan cerdas secara akademis, tetapi juga memiliki kekuatan moral, spiritual, dan identitas yang kokoh sebagai umat Islam, yang mampu berdiri tegak di tengah arus perubahan dan tantangan zaman.

Penutup

Sebagai penutup, sejarah Sekolah Rakyat (SR) menggambarkan perjalanan pendidikan yang kompleks di masa kolonial. Meskipun SR dirancang untuk memenuhi kebutuhan sistem kolonial, institusi ini berhasil memberikan akses pendidikan bagi mayoritas masyarakat pribumi yang sebelumnya terabaikan. Kehadiran SR juga menunjukkan upaya pemerintah kolonial untuk mengakomodasi pendidikan agama Islam, meskipun dalam batasan yang ketat. Transformasi SR menjadi Sekolah Dasar (SD) pasca-kemerdekaan mengindikasikan pergeseran paradigma pendidikan di Indonesia, dari pendidikan yang mendukung kepentingan kolonial menuju pendidikan yang menekankan pada nilai-nilai nasionalisme dan pembangunan karakter. Pelajaran yang diambil dari pengalaman SR sangat penting dalam merumuskan kebijakan pendidikan di masa kini, di mana inklusivitas dan responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat lokal menjadi kunci untuk mencapai pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan. Dalam menghadapi tantangan pendidikan di era modern, penting untuk terus menggali dan mengapresiasi warisan pendidikan masa lalu sebagai landasan untuk pengembangan sistem pendidikan yang lebih baik di masa depan.

Referensi

- Admin. "Sejarah Sekolah Rakyat Di Indonesia." *Museum Pendidikan Nasional*, October 10, 2023. <https://museumpendidikannasional.upi.edu/sejarah-sekolah-rakyat-di-indonesia/>.
- Administrator. "Menyingkap Perkembangan Pendidikan Sejak Masa Kolonial Hingga Sekarang: Perspektif Pendidikan Kritis – Program Studi Pendidikan Sejarah," September 5, 2017. <https://sejarah.upi.edu/artikel/dosen/menyingkap-perkembangan-pendidikan-sejak-masa-kolonial-hingga-sekarang-perspektif-pendidikan-kritis/>.

- Fuadi, Danna Aditya Rahma, and Devgano Risydan Al Anshori. "Perkembangan Pendidikan Indonesia pada Zaman Penjajahan Ii (Abad 20 Termasuk Masa Pendudukan Jepang)." *Global Education Journal* 1, no. 3 (July 26, 2023): 267–84. <https://doi.org/10.59525/gej.v1i3.217>.
- Hamami, Tasman. "PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI SEKOLAH UMUM SEBAGAI KEHARUSAN SEJARAH," n.d.
- Horohiung, Veronika. "Pendidikan Formal Era Hindia Belanda di Kepulauan Sangehe Pada tahun 1848 – 1945." *Jurnal Pendidikan Sejarah* 5, no. 2 (July 30, 2016): 54–67. <https://doi.org/10.21009/JPS.052.05>.
- Karsiwan, Karsiwan, and Lisa Sari. "Kebijakan Pendidikan Pemerintah Kolonial Belanda Pada Masa Politik Etis Di Lampung." *Tsaqofah Dan Tarikh Jurnal Kebudayaan Dan Sejarah Islam* VI (June 1, 2021): 1–16.
- Lestari, Dwi. "RESPON SAREKAT ISLAM TERHADAP KEBIJAKAN PENDIDIKAN PEMERINTAH KOLONIAL BELANDA (1905-1933)." *JSI: Jurnal Sejarah Islam* 1, no. 01 (July 25, 2022): 7–40. <https://doi.org/10.24090/jsij.v1i1.6644>.
- Rama, Bahaking. "SEJARAH PERKEMBANGAN PENDIDIKAN ISLAM DI INDONESIA," n.d.
- Raya, Moch Khafidz Fuad. "Sejarah Orientasi Pendidikan Islam Di Indonesia (Dari Masa Kolonial Hingga Orde Baru)." *Jurnal Pendidikan Islam* 8, no. 2 (2018): 228–42.
- Rohman, Miftahur. "KEBIJAKAN PENDIDIKAN ISLAM MASA PENJAJAHAN JEPANG." OSF, September 29, 2018. <https://doi.org/10.31219/osf.io/ack3p>.
- Sabarudin, Muhammad. "Pola dan Kebijakan Pendidikan Islam Masa Awal dan Sebelum Kemerdekaan" 1, no. 1 (2015).
- Saputra, Fedry. "SEJARAH PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN PENDIDIKAN ISLAM DI INDONESIA." *AL-HIKMAH (Jurnal Pendidikan Dan Pendidikan Agama Islam)* 3, no. 1 (January 22, 2021): 98–108. <https://doi.org/10.36378/al-hikmah.v3i1.1137>.
- Suherman, Andi, and Weny Widyawati Bastaman. "PERKEMBANGAN SEKOLAH RAKYAT (VOLKSCHOOL) DI GUNUNG KENCANA KABUPATEN LEBAK BANTEN TAHUN 1940 - 1964." *BIHARI: JURNAL PENDIDIKAN SEJARAH DAN ILMU SEJARAH* 2, no. 2 (December 31, 2019). <https://jurnal.unsil.ac.id/index.php/bihari/article/view/1277>.
- "View of INOVASI PENDIDIKAN (SUATU STUDI KEBIJAKSANAAN PENDIDIKAN ORDE LAMA)." Accessed September 24, 2024. <http://ejournal.stit-ru.ac.id/index.php/raudhah/article/view/74/80>.
- Wahid, Abdul, Islam Syarif, Hidayatullah Jakarta, Kota Selatan, Provinsi Banten, Kata Kunci, Kebijakan Pendidikan, Kolonial Belanda, and Pendidikan Islam. "Eksistensi Dan Kebijakan Pendidikan Islam Pada Masa Kolonial Belanda," October 1, 2022.